

BAB IV

KESIMPULAN

Negara Amerika Serikat dan negara Irak merupakan dua negara yang berbeda paham ideologi, politik, serta budaya. Amerika Serikat mempunyai paham ideologi demokrasi dalam politik dan memiliki budaya yang disebut dengan “*pax Americana*” atau “*Americanization Global Culture*”. Sedangkan negara Irak mempunyai paham ideologi politik yaitu sosialisme arab yang diusung oleh partai baath pada masa Saddam Hussein berkuasa tetapi sekarang negara Irak mengusung paham demokrasi dengan budaya masyarakat yang mengikuti agama dominan yaitu islam.

Negara Irak yang mempunyai sumber daya alam utama yaitu minyak bumi, memiliki seorang pemimpin yang diktator, dan membuat negara ini menjadi negara yang otoriter. Pada era kepresidenan Saddam Hussein negara Irak menganut sistem pemerintahan yang otoriter. Sistem pertahanan dibangun dengan melalui pertahanan militer yang kuat, kebijakan luar negeri yang radikal, represif dan agresif salah satu kebijakan Saddam Hussein yang berani adalah melakukan perang dengan dengan negara Iran dan menginvasi negara Kuwait. Oleh karenanya pada era rezim Saddam Hussein negara Irak menjadi negara yang paling ditakuti di kawasan timur tengah.

Negara Amerika Serikat yang mempunyai hegemoni di semua bidang baik itu di bidang politiknya yang menganut paham demokrasi, di bidang ekonomi yang menganut paham liberal, dan di bidang militernya dengan membuat sistem pertahanan yang hebat dan kuat yang dibuat melalui kebijakan pertahanan militer serta dengan dibangunnya pangkalan militer di beberapa negara sesuai dengan kepentingannya Amerika Serikat. Tetapi negara ini tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi untuk kebutuhan negaranya tersebut, oleh sebab itu dengan kepentingan luar negeri Amerika Serikat tentang sumber daya alam dan dengan kebijakan tentang pembuatan pangkalan militer untuk sekaligus mengamankan sumber daya serta menjaga stabilitas keamanan bagi Amerika Serikat.

Dari perbedaan – perbedaan diatas bahwa dari kehidupan sosial masyarakat Amerika Serikat juga berbeda. Amerika Serikat merupakan negara kaya dengan kehidupan rakyat yang ke timur – timuran cenderung ke arah budaya globalisasi. Begitupun dari bidang militer, Amerika Serikat memiliki angkatan pasukan militer yang kuat, persenjataan yang canggih, dan mempunyai pangkalan militernya yang berada hampir di seluruh dunia.

Sedangkan Irak sendiri yang bekas dibawah kekuasaan kerajaan Ottoman, yang sekarang negara Turki. Merupakan negara yang kaya akan sumber daya minyak, memiliki dinamika sosial yang beraneka ragam. Keberagaman suku bangsa ini mempengaruhi kehidupan sosial dan politik Irak. Komposisi penduduk Irak terdiri dari keturunan bangsa Arab, suku Kurdi, Turki, dan Persia. Keturunan Bangsa Arab di Irak terbagi lewat golongan dalam agama islam yaitu sunni dan syiah. Di bidang militer negara Irak menggunakan *military power* dalam menjalankan pemerintahan. Kedua Negara memiliki kesamaan dari para Kepala Negara masing – masing, Presiden Amerika Serikat George Bush dan Presiden Irak Saddam Hussein. Kesamaan dari kedua Presieden Negara tersebut adalah dari sifat berkuasa dan memimpin negara serta tentang kekuatan hegemoni dari masing – masing negara tersebut. Hegemoni Amerika Serikat adalah memutuskan untuk menyerang Irak dan negara kawasan di timur tengah lainnya dalam kepentingannya untuk menguasai sumber daya minyak. Sedangkan hegemoni Irak adalah tentang perluasan wilayah yaitu invasi yang dilakukan terhadap Kuwait dan Perang dengan Iran. Pada dasarnya keduanya ingin sama – sama menguasai wilayah negara lain karena memiliki suatu kepentingan tertentu.

Pasca invasi Amerika Serikat ke Irak, negara ini hancur di bidang militer, kejatuhan pasukan militer serta warga sipil yang merenggut banyak korban. Pada saat Rezim Presiden Saddam Hussein di Irak militer dibuat, dibentuk dan digunakan oleh mantan presiden Irak itu sebagai alat kekuasaan dan memerintah, sehingga pada saat Amerika Serikat datang dengan menginvasi negara ini dan menurunkan rezim dari Saddam Hussein seketika itu habis juga sistem pertahanan dan keamanan serta militer Irak yang sudah dibangun oleh mantan presiden Saddam Hussein. Saat itu Amerika Serikat belum meniggalkan Irak dan berupaya untuk membangun negara Irak kembali. Dengan segala upaya Amerika Serikat

dan bantuan dari negara sekutunya dan juga dibantu oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam hal bantuan pasukan militer melalui pasukan koalisi asing Irak. PBB melalui Dewan Keamanan membantu untuk mengatur pasukan koalisi asing Irak dan PBB membuat resolusi untuk Deklarasi hubungan kerja sama antara Amerika Serikat dan Irak. Pada akhirnya Irak memilih untuk melakukan hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat dengan bidang keamanan dan militer. Berikut ini adalah faktor – faktor kepentingan dibalik terjadinya perjanjian kerjasama antara Amerika Serikat dan Irak yaitu :

a. Faktor Kepentingan Irak yaitu :

1) Kepentingan di bidang Politik

Serangan Amerika Serikat di Irak banyak menyebabkan kehancuran terjadi di Irak. Runtuhnya Saddam tidak membuat serta merta Irak menjadi aman dan damai. Hal ini menimbulkan suatu kekosongan kekuasaan yang menimbulkan adanya manifesto politik yang chaotik dan kadang - kadang berakhir dengan kerusuhan (etc., 2013). Tumbangnya rezim Saddam juga mampu memberikan harapan baru terhadap bangkitnya kembali gerakan politik Syiah Irak yang telah sekian lama tertindas di bawah pemerintah Saddam Hussein. Timbulnya harapan untuk mendapat tempat di dalam tatanan pemerintah yang baru. Melihat perkembangan Irak pasca Saddam Hussein, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi Amerika Serikat dan sekutunya pasca perang sangat berat. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa pasukan militer tidak dapat sepenuhnya menciptakan stabilitas, keamanan. Kelompok-kelompok oposisi yang sebelumnya telah menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat, tidak menginginkan para pejabat Amerika Serikat memainkan peran yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan pasca invasi dulu. Kelompok ini kemudian menyatakan bahwa orang - orang Irak sendiri yang memiliki kompeten dan mampu untuk membangun Irak kembali.

2) Kepentingan Irak di Bidang Sosial

Meletusnya perang saudara di Irak sendiri, khususnya pendukung Saddam dan kelompok yang kontra Saddam. Latar belakang permusuhan antara kedua kelompok ini sebenarnya sudah ada sebelumnya, namun lebih memanas ketika rezim Saddam jatuh. Hal tersebut menimbulkan adanya konflik internal di dalam masyarakat sendiri. Pertama yaitu perang saudara antara kelompok Sunni dan Syiah, yang terbukti dengan terbunuhnya Abdul Majid al-Khui (putra dari tokoh Syiah). Hal ini akan terus berlanjut sampai ada kebijakan politik dan sosial yang akan meredam permusuhan mereka, yang datangnya dari pihak pemerintah yang menjadi alat untuk mendamaikan kedua belah kelompok. Dari segi peradaban dan pergeseran nilai jelas akan mengalami perubahan yang signifikan diakarenakan akan ada pemerintah baru yang akan mengeluarkan kebijakan baru untuk pembangunan kembali Irak pasca invasi dulu. Peradaban Irak di masa depan akan lebih terbuka dan demokratis dibanding pada masa Saddam yang selalu lebih mengutamakan perang sebagai alat menegakkan kehormatan bangsa Irak di mata internasional.

b. Faktor kepentingan Amerika Serikat yaitu :

1) Kepentingan Ideologi

Ideologi adalah salah satu visi, suatu gambaran tentang masyarakat yang baik dan mempunyai sarana – sarana utama untuk mencapainya.

Ideologi mengandung beberapa substansi yaitu :

a) Sistem keyakinan politik

Gagasan - gagasan politik yang merumuskan orientasi tindakan

b) Berbagai gagasan kelompok yang sedang memerintah

c) Pandangan dunia terhadap kelompok sosial tertentu

d) Gagasan - gagasan yang mempropagandakan kesadaran palsu diantara yang tertindas

Membawa Ideologi politik pemerintahan yang berdemokrasi ke Irak adalah untuk mempertahankan hegemoni Amerika Serikat di Timur

Tengah. Dengan ini diharapkan negara – negara di kawasan Timur Tengah mampu diajak kerjasama.

2) Kepentingan Terhadap Senjata Pemusnah Massal

Senjata pemusnah massal merupakan senjata yang paling ditakuti di dunia karena kemampuannya dalam menciptakan kerusakan dan korban yang begitu besar. Di era modern senjata ini pertama digunakan oleh Amerika Serikat dan melihat dampaknya setelah apa yang terjadi di Perang Dunia II, dimana Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Melihat dampak yang terjadi setelah penggunaan pertama kali senjata pemusnah massal, masyarakat internasional mulai melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap senjata pemusnah massal. Amerika Serikat yang sudah terbiasa melakukan arm race sejak perang dingin berlangsung sangat peduli terhadap teknologi senjata menjadi perhatian tersendiri bagi Amerika Serikat yang memang telah menjadi negara terdepan dalam bidang militer dan senjata. Amerika Serikat yang selalu memiliki anggaran militer terbesar di dunia menjadi negara yang terdepan dalam perihal teknologi dan kepemilikan senjata. Untuk itu Amerika Serikat juga merasa harus bertanggung jawab terhadap penyebaran senjata, khususnya senjata – senjata non konvensional dan memiliki daya hancur yang besar karena Amerika Serikat beranggapan jika senjata – senjata ini jatuh ke tangan yang salah maka hal ini sudah dapat dipastikan akan menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi seluruh umat manusia.

3) Kepentingan Keamanan

Kepentingan Amerika Serikat di Irak dan di Timur Tengah adalah berusaha menjaga stabilitas keamanan kawasan di negara - negara Timur Tengah termasuk di Irak yang rentan terhadap konflik. Stabilitas keamanan dilakukan dengan mendirikan pangkalan militer di Irak. Dengan ini kepentingan Amerika Serikat mengenai suplai minyaknya tidak akan terganggu. Seperti keamanan militer, dalam hal ini setelah invasi Amerika Serikat ke Irak ancaman terbesar adalah

teroris dan senjata pemusnah massal, jelas mengancam keamanan militer Amerika Serikat. Keamanan Politik, dalam hal ini pemerintah Irak berusaha menjaga hubungan diplomatik dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menghindari terjadinya kembali perang antara Amerika Serikat dengan Irak. Keamanan Ekonomi, dalam hal ini Amerika Serikat berusaha menjaga kepentingan ekonomi mereka di Irak yaitu sumber daya minyak, dengan pasukan militer menjaga sumber minyak tersebut. Keamanan nasional dalam hal ini pemerintah Irak berusaha untuk tetap menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah di Irak melalui militer yang mandiri. Untuk itu dibuat perjanjian mengenai SOFA (Status of Force Agreement) untuk mengakomodasi keamanan akibat konflik yang terus menerus di Irak. Perjanjian ini dibentuk melalui dicanangkannya Deklarasi Hubungan Jangka Panjang Amerika Serikat – Irak. Dengan melalui Operasi militer dilakukan atas aturan dari SOFA (Status of Force Agreement) yaitu dengan mempersenjatai, melatih, dan melakukan operasi bersama adalah serangkaian usaha antara Amerika Serikat dan Irak untuk menghadapi konflik dan kekerasan politik di Irak. Amerika Serikat dan Irak membuat Deklarasi Perjanjian dengan menghasilkan Kerangka Keamanan dan Perjanjian Strategis yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009, lalu dilakukan pertukaran nota diplomatik antara Amerika Serikat dan Irak. Perjanjian keamanan disahkan otoritas Amerika Serikat dalam rangka mengambil tindakan militer dalam membela negara lain yang telah diratifikasi menjadi suatu perjanjian yang utuh. Di dalam bidang pertahanan keamanan dan militer melalui Perjanjian Keamanan bilateral, pasukan militer Amerika Serikat melakukan penarikan diri pasukan militer mereka dari daerah perkotaan di Irak. Pada tanggal 31 Agustus 2010, Presiden Barack Obama mengumumkan akhir operasi tempur besar di Irak, penyelesaian penarikan semua brigade tempur Amerika Serikat, dan transisi dari peran kekuatan militer Amerika Serikat yang tersisa dari 50.000 tentara untuk menasihati dan membantu pasukan keamanan

Irak. Di bidang keamanan, Perjanjian Keamanan mengatur bahwa Amerika Serikat dan Irak akan terus membina kerjasama yang erat berkaitan pertahanan dan pengaturan keamanan, yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Perjanjian keamanan Persetujuan Kerangka Kerja Strategis juga menyatakan bahwa dengan kehadiran pasukan Amerika Serikat di Irak adalah atas permintaan dari pemerintah Irak dan Amerika Serikat juga tidak akan menggunakan tanah, laut, atau udara di wilayah negara Irak sebagai pangkalan untuk menyerang negara - negara lain hanya untuk membuat basis permanen atau kehadiran permanen militer di Irak.

Pada akhirnya Amerika Serikat masih belum dapat melepaskan Irak setelah invasi. Berbagai kepentingan Amerika Serikat kepada Irak yaitu utamanya di bidang politik, keamanan, dan ekonomi. Kepentingan di bidang politik membuat Amerika Serikat akan menjadikan Irak negara demokrasi. Kepentingan keamanan adalah akan membuat keamanan di bidang militer Irak akan lebih mandiri dan kuat. Kepentingan terakhir adalah mengenai sumber daya minyak di Irak. Akibatnya berikut ini adalah hasil konsekuensi yang didapat Irak atas kehadiran Amerika Serikat di negaranya yaitu :

- a. Pertama, Amerika Serikat di Irak merupakan sebuah cerminan dan kritik terhadap keamanan nasional dan sebuah bukti untuk perang melawan “*war on terror*” di Irak.
- b. Kedua, Amerika Serikat dapat memperluas jangkauan kerjasamanya dengan negara – negara di kawasan timur tengah sama seperti yang terjadi di Irak.
- c. Ketiga, tidak ada jalan lain bagi Irak, semua hal yang berhubungan dengan Irak melibatkan Amerika Serikat..
- d. Keempat, melalui perjanjian *Status of Force Agreement* adalah perjanjian militer antara Amerika Serikat dan Irak merupakan suatu langkah konkret yang dilakukan kedua negara setelah terjalinnya hubungan bilateral.
- e. Kelima, Implementasi dari *Status of Force Agreement* adalah dengan melakukan Operasi militer seperti “*Operation New Dawn*”.

Kerjasama perjanjian antara Amerika Serikat dan Irak melalui *Status of Force Agreement* dapat dikatakan berhasil dan gagal atau *win-win solution*. Sebab, dikatakan berhasil karena sejak invasi tahun 2003 oleh Amerika Serikat. Fakta membuktikan bahwa keberhasilan Amerika Serikat dalam membangun kembali kekuatan militer Irak yang hancur lebur akibat invasi dinyatakan berhasil dan Irak memerlukannya kekuatan militernya untuk meredam konflik yang tiada henti di Irak.

Selanjutnya, dikatakan tidak berhasil penyebabnya adalah karena ternyata Amerika Serikat melalui perjanjian kemanan SOFA tersebut tidak mampu menghentikan konflik di Irak malah menambah konflik yang ada. Dibalik dari kerjasama antara Amerika Serikat dan Irak tersebut Amerika Serikat sendiri memiliki kebijakan luar negeri untuk Irak, yaitu menjadikan negara Irak negara yang berdemokrasi, berdaulat, adil, stabil, dan mandiri. Fokus - fokus Kebijakan Amerika Serikat di Irak adalah untuk membuat negara tersebut menjadi demokrasi, membela keadilan, membela hak asasi manusia, dan memerangi teroris. Berupaya mempromosikan mengimplementasikan, dan merepresentatifkan kebijakan – kebijakan Amerika Serikat tersebut yang pada akhirnya menjadikan pemerintahan negara Irak menjadi pemerintahan yang bertanggung jawab kepada negaranya. Sedangkan fokus kepentingan Irak adalah mencapai negara yang damai, adil, dan stabil keamanan serta pertahanan negaranya.